JIRK
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.5, No.11, April 2026

RATCHET EFFECT TERHADAP ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA PADANG

Oleh
Putri Intan Permata Sari[1], Dodi Suryadi[2]
[1,2] Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang
Email: [1]putriintanpermatasari@upiyptk.ac.id

Article History:
Received: 25-02-2026
Revised: 26-03-2026
Accepted: 28-03-2026

Keywords: *Ratchet Effect, Viskositas Fiskal, APBD, Kota Padang, Belanja Daerah*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren realisasi anggaran serta membuktikan secara empiris keberadaan fenomena Ratchet Effect dan Viskositas Fiskal pada APBD Kota Padang periode 2020-2024. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian ini mengolah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) audited yang bersumber dari Portal Transparansi BPKAD Kota Padang. Fokus utama analisis dilakukan pada identifikasi asimetri respons belanja terhadap fluktuasi pendapatan daerah sebagai basis pembuktian efek ratchet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang terjebak dalam kondisi downward rigidity, di mana belanja daerah tetap meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,98% meskipun pendapatan sempat mengalami tekanan akibat pandemi. Viskositas fiskal terlihat signifikan pada Belanja Operasi, khususnya Belanja Pegawai dan Bantuan Sosial yang melonjak tajam, sehingga mengakibatkan terjadinya crowding out terhadap Belanja Modal yang justru terkontraksi hingga -6,61%. Temuan ini mengonfirmasi adanya pola penganggaran inkremental yang kaku, sehingga membatasi ruang fiskal untuk pembangunan produktif. Sebagai implikasi, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap komitmen biaya tetap dan pertimbangan penerapan Zero-Based Budgeting secara selektif guna menciptakan postur anggaran yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan bagi pembangunan daerah di masa depan*

PENDAHULUAN

Latar belakang

Anggaran untuk setiap pemerintah, baik daerah maupun pusat, merupakan instrumen kebijakan publik yang sangat vital. Anggaran adalah dokumen yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh legislatif, yang berisikan wewenang pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan dalam periode tertentu (Norton &

Elson, 2002). Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja dengan membandingkan rencana dan realisasinya, yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.

Pengelolaan anggaran daerah melibatkan hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah (eksekutif) sebagai *agent* dan DPRD (legislatif) sebagai *principal* (Safitri & Sari, 2020). Namun, proses ini sering kali diwarnai oleh asimetri informasi dan pola penganggaran inkremental, di mana anggaran tahun sebelumnya dijadikan acuan utama tanpa evaluasi menyeluruh. Kondisi ini memicu munculnya fenomena *Ratchet Effect*, yaitu kondisi di mana belanja daerah cenderung meningkat mengikuti kenaikan pendapatan, namun bersifat kaku untuk turun (*downward rigidity*) saat pendapatan melandai atau mengalami kontraksi (Dahlberg & Mörk, 2020). Penting untuk digarisbawahi bahwa analisis terhadap realisasi pendapatan daerah merupakan basis utama untuk mengidentifikasi keberadaan *Ratchet Effect* pada postur belanja. Fenomena ini hanya dapat dibuktikan secara empiris jika ditemukan asimetri respons belanja terhadap fluktuasi pendapatan; di mana belanja merespons secara ekspansif saat pendapatan tumbuh, namun merespons secara lambat atau bahkan tetap meningkat saat pendapatan menurun.

Gejala tersebut sering diperburuk oleh Viskositas Fiskal (*Fiscal Viscosity*), yaitu tingkat "kekentalan" atau resistensi belanja terhadap perubahan akibat hambatan internal birokrasi dan komitmen biaya tetap (Gerritse, 1990). Urgensi fenomena ini terlihat jelas pada postur anggaran Kota Padang periode 2019-2024. Selama masa pandemi COVID-19 tahun 2020, terjadi lonjakan luar biasa pada belanja tak terduga dengan rata-rata peningkatan mencapai 1.725,36% sebagai respons darurat kesehatan.

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-Rata
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD	
BELANJA DAERAH	**2,350,768,297,380.71**	**2,139,909,477,473.78**	**2,211,843,587,663.33**	**2,224,959,294,893.27**	**2,324,673,967,306.73**	**2,565,006,041,510.00**	2.98
Belanja Operasi	**1,855,417,447,101.87**	**1,694,645,158,582.52**	**1,899,598,872,546.93**	**1,831,000,944,817.20**	**1,924,093,923,572.24**	**2,353,441,820,799.00**	5.48
Belanja Pegawai	1,067,507,780,938.00	1,022,368,138,151.00	1,033,458,342,914.00	971,124,928,491.00	966,108,721,300.00	1,353,371,349,300.00	6.42
Belanja Barang dan Jasa	686,566,245,666.55	640,002,048,268.52	772,104,014,701.86	695,309,669,939.02	724,492,347,958.07	846,339,413,703.00	5.23
Belanja Bunga	4,198,402,972.00	1,619,535,715.00	0.00	1,522,987,359.00	2,496,004,487.00	1,782,143,397.00	(24.42)
Belanja Subsidi		0.00	15,093,006,902.00	17,769,976,422.33	29,446,327,138.97	39,786,615,000.00	39.52
Belanja Hibah	89,134,027,525.32	29,990,936,448.00	71,741,808,029.07	135,566,193,405.85	185,058,844,688.20	102,676,119,399.00	21.97
Belanja Bantuan Sosial	8,010,990,000.00	664,500,000.00	7,201,700,000.00	9,707,189,200.00	16,491,678,000.00	9,486,180,000.00	179.01
Belanja Modal	**491,009,055,949.84**	**304,791,762,148.61**	**297,909,227,312.40**	**392,983,750,076.07**	**399,691,617,435.49**	**199,754,667,359.00**	(6.61)
Belanja Tidak Terduga	**4,341,794,329.00**	**140,472,556,742.65**	**14,335,487,804.00**	**974,600,000.00**	**888,426,299.00**	**11,809,553,352.00**	1,725.36
Belanja Transfer	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00

Gambar 1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Padang 2019-2024

Memasuki fase pasca-pandemi, realisasi belanja daerah Kota Padang tidak menunjukkan tanda-tanda normalisasi mengikuti fluktuasi realisasi pendapatan daerah yang sempat tertekan. Sebaliknya, belanja daerah konsisten meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,98%, hingga mencapai angka tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp2,56 triliun. Secara lebih rinci, pertumbuhan ini didorong oleh Belanja Operasi (rata-rata naik 5,48%), dengan Belanja Pegawai melonjak sebesar 6,42% dan Belanja Barang Jasa sebesar 6,73%.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

Bahkan, alokasi bantuan sosial mengalami fluktuasi tajam dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 179,01%.

Di sisi lain, belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan aset jangka panjang justru mengalami tren penurunan dengan rata-rata sebesar -6,61% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa APBD Kota Padang terjebak dalam viskositas fiskal, di mana anggaran terserap pada pengeluaran rutin yang sulit untuk dikurangi (*sticky upward*), sementara alokasi untuk pembangunan produktif semakin terhimpit. Permasalahan utama muncul ketika penyusunan anggaran hanya mengacu pada pengulangan pengeluaran tahun sebelumnya tanpa mempertimbangkan efisiensi relatif terhadap capaian pendapatan riil.

Pendekatan *ratcheting* ini menyebabkan standar kinerja yang dianggap menguntungkan akan terus ditingkatkan, namun varian yang tidak menguntungkan cenderung diikuti standar rendah, termasuk dalam pengalokasian belanja modal (Hidayah & Sari, 2022). Ketidakfleksibelan ini mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan mendesak atau perubahan prioritas ekonomi pasca-pandemi secara tangkas.

Meskipun penelitian mengenai *Ratchet Effect* telah dilakukan, terdapat *research gap* di mana sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kondisi fiskal normal (Puspitasari et al., 2023). Masih terbatas literatur yang membedah mekanisme viskositas fiskal dan asimetri respons belanja terhadap pendapatan selama masa transisi kritis dari pandemi menuju pasca-pandemi di tingkat kota. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena *Ratchet Effect* dan Viskositas Fiskal pada realisasi belanja Pemerintah Kota Padang periode 2019-2024 untuk memberikan rekomendasi penganggaran yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan merupakan teori yang menjelaskan kontrak antara prinsipal dan agen. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki hubungan keagenan di mana prinsipal membuat kebijakan dan agen yang menjalankan kebijakan tersebut (Rahman, 2022). Prinsipal dalam konteks ini adalah pihak yang memberikan perencanaan, mengatur, dan mengambil keputusan, sementara agen bertanggung jawab melaksanakan amanah tersebut demi kepuasan masyarakat (Anton, 2010). Secara spesifik, rakyat bertindak sebagai prinsipal dan pejabat pemerintah sebagai agen.

Hubungan ini sering kali memicu masalah asimetri informasi, di mana agen memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal, dan tidak semua informasi tersebut disampaikan secara akurat (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Kondisi ini diperparah ketika masyarakat tidak memiliki institusi formal yang kuat untuk mengawasi kinerja agen, sehingga perilaku *moral hazard* dapat terjadi dengan mudah. Dalam kaitannya dengan anggaran, Chaterine Anjeli (2020) menjelaskan bahwa fenomena *ratchet* akan memperlihatkan eksistensi teori agensi pada pelaksanaannya, di mana agen cenderung memanipulasi informasi anggaran untuk mengamankan kepentingan birokrasi.

2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Siklus penyusunan APBD diawali

dengan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai landasan rancangan APBD. Berdasarkan KUA, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya, Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai prakiraan belanja untuk tahun berikutnya. RKA ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai bagian dari pembicaraan pendahuluan RAPBD.

3. Inkrementalisme Anggaran

Penyusunan anggaran daerah sering kali terjebak dalam pola inkrementalisme. Wildavsky & Caiden (2020) menyatakan bahwa anggaran tahun berjalan cenderung merupakan variasi kecil dari anggaran tahun sebelumnya. Birokrasi biasanya tidak mengevaluasi program secara menyeluruh dari nol, melainkan menggunakan angka tahun lalu sebagai batas dasar (*base*) dan hanya fokus pada penambahan (*increment*). Hal ini menyebabkan anggaran menjadi kaku dan sulit untuk mengalami pemotongan drastis meskipun kondisi ekonomi sedang melandai.

4. Prinsip *Ratcheting* (Efek Roda Gigi)

Prinsip *ratchet* cenderung menggunakan kinerja saat ini sebagai tolak ukur untuk menentukan target di tahun selanjutnya. Kinerja standar cenderung meningkat setelah periode kinerja yang baik (Lee & Plummer, 2007). Weitzman (1980) menyimpulkan bahwa kinerja saat ini bekerja seperti roda gigi berlekuk (*ratchet*) yang bertujuan memperbaiki tolak ukur target periode selanjutnya. Dalam anggaran pemerintah, varian yang menguntungkan dari kinerja tahun lalu dikaitkan dengan peningkatan target tahun berjalan, sedangkan varian yang tidak menguntungkan sering kali tidak diikuti dengan penurunan target yang proporsional (Lee & Plummer, 2007). Tujuan dari *ratcheting* ini adalah untuk mengurangi kesenjangan anggaran, namun di sisi lain sering kali menyebabkan pemborosan karena anggaran tahun lalu dianggap sebagai hak permanen birokrasi.

5. Teori Viskositas Fiskal (*Fiscal Viscosity*)

Viskositas fiskal merujuk pada tingkat "kekentalan" atau resistensi anggaran terhadap perubahan. Jika anggaran bersifat fleksibel, ia akan bergerak dinamis mengikuti pendapatan. Namun, anggaran yang viskos (kental) akan tetap bertahan pada posisi semula meskipun pendapatan menurun (Gerritse, 1990). Viskositas ini sering terjadi pada komponen belanja pegawai dan belanja operasi rutin yang memiliki perlindungan regulasi atau kontrak hukum, sehingga menciptakan kekakuan bawah (*downward rigidity*) pada postur APBD daerah (Dahlberg & Mörk, 2020).

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Kurniawan & Kusumastuti, 2024). Data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif yang bersumber dari Portal Transparansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang (https://bpkad.padang.go.id/transparansi-index), dengan fokus analisis pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *audited* periode 2020 hingga 2024. Melalui data tersebut,

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

penelitian ini mendeskripsikan tren realisasi anggaran sekaligus membuktikan keberadaan fenomena *Ratchet Effect* dan Viskositas Fiskal pada APBD Kota Padang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

2. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat. Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Padang yang mencakup data target dan realisasi Pendapatan serta Belanja Daerah selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024).

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data diperoleh dari dokumen resmi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang atau melalui portal resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah **dokumentasi**, yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data angka dari laporan keuangan tahunan. Data yang diambil meliputi:

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah.
2. Target dan Realisasi Belanja Daerah (Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer).

5. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari ambiguitas, variabel dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi: Nilai nominal rencana dan capaian keuangan dalam satu tahun anggaran.
2. Ratchet Effect: Kondisi di mana realisasi belanja tahun berjalan dipengaruhi oleh realisasi belanja tahun sebelumnya dan cenderung kaku untuk turun meskipun pendapatan berfluktuasi (Lee & Plummer, 2007).
3. Viskositas Fiskal: Tingkat resistensi atau "kekentalan" pos belanja tertentu (terutama belanja pegawai) terhadap upaya pemotongan anggaran (Gerritse, 1990).
4. Pertumbuhan Belanja/Pendapatan: Persentase perubahan nilai realisasi tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik **analisis tren dan analisis varians** dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tabulasi Data: Menyusun data mentah dari LRA ke dalam tabel Excel untuk menghitung selisih (varians) antara target dan realisasi.
2. Perhitungan Pertumbuhan: Menghitung laju pertumbuhan tahunan menggunakan rumus:

$$Pertumbuhan = \frac{Realisasi_t - Realisasi_{t-1}}{Realisasi_{t-1}} \; x \; 100\%$$

3. Analisis Komparatif: Membandingkan grafik pertumbuhan pendapatan dan belanja untuk melihat keberadaan asimetri (di mana belanja tumbuh lebih cepat atau turun lebih lambat dari pendapatan).

4. Interpretasi Teoretis: Menghubungkan hasil olah data dengan Teori Keagenan, Inkrementalisme, dan Viskositas Fiskal untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Tren Realisasi APBD: Eksplorasi Fenomena *Downward Rigidity*

Berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), postur APBD Kota Padang periode 2020-2024 menunjukkan pola yang krusial untuk dikaji karena mencakup fase sebelum pandemi, masa darurat COVID-19, hingga fase pemulihan ekonomi nasional.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Padang Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pertumbuhan Belanja (%)
2020	2.167.625.242.572,67	2.139.909.477.473,78	-
2021	2.222.266.851.375,30	2.211.843.587.663,33	3,36%
2022	2.249.627.970.195,56	2.224.959.294.893,27	0,59%
2023	2.310.513.101.363,50	2.324.673.967.306,73	4,48%
2024	2.531.277.365.408,82	2.444.666.033.218,96	5,16%

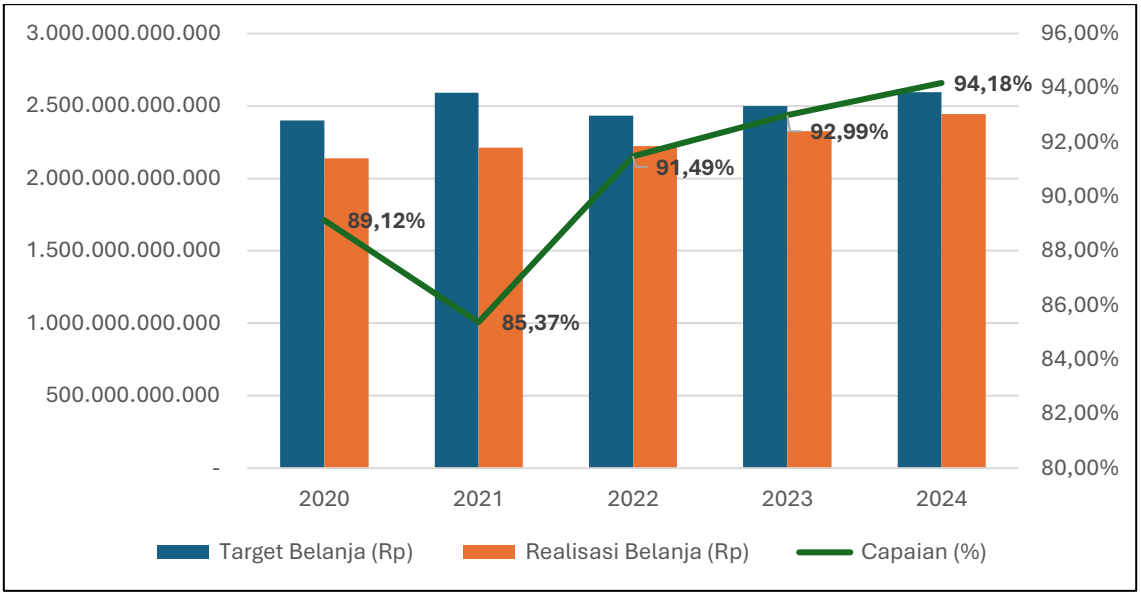
Secara agregat, realisasi belanja menunjukkan tren yang terus menanjak secara konsisten (monoton), meningkat dari Rp2,13 triliun (2020) hingga diproyeksikan mencapai Rp2,56 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan strategi fiskal yang ekspansif. Namun, terdapat anomali di mana realisasi belanja cenderung naik meskipun realisasi pendapatan sering kali mengalami fluktuasi dan tidak mencapai target 100%.

Fenomena ini mengonfirmasi adanya *downward rigidity* (kekakuan untuk turun), di mana pengeluaran pemerintah daerah seolah-olah memiliki "batas bawah" yang akan terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun pendapatan daerah dinamis akibat ketidakpastian ekonomi makro, belanja daerah Kota Padang tetap mampu mempertahankan laju pertumbuhannya. Hal ini menandakan bahwa struktur anggaran telah terkunci pada tingkat pengeluaran tertentu yang sulit untuk direnegosiasi kembali ke level yang lebih rendah.

2. Interpretasi *Budgetary Ratchet*: Optimisme Perencanaan vs Realita Fiskal

Kekakuan anggaran mulai terlihat nyata saat membandingkan antara target yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai. Hal ini mengungkapkan adanya gejala ***Planning Ratchet***.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

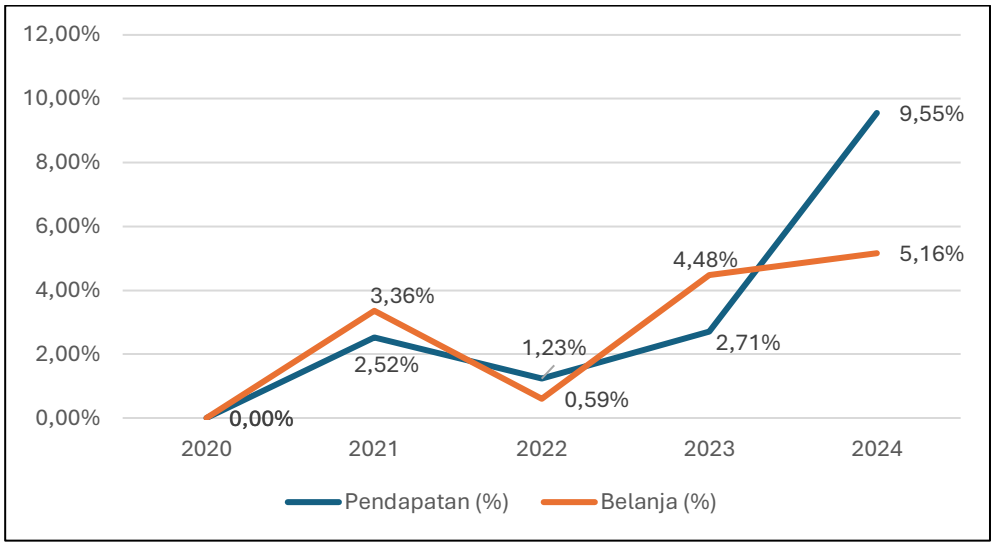


Gambar 2. Target, Realisasi, dan Capaian Belanja Pemerintah Kota Padang Tahun 2020 s.d. 2024

Perhatikan selisih antara target belanja dan realisasi pada tahun 2021 yang cukup lebar, di mana capaian hanya sebesar **85,37%**. Dalam perspektif efisiensi murni, kegagalan penyerapan ini seharusnya diikuti dengan rasionalisasi atau penurunan target pada tahun berikutnya. Namun, realita menunjukkan Pemerintah Kota Padang tetap mempertahankan plafon anggaran yang tinggi pada 2022. Fenomena ini sesuai dengan prinsip *Ratcheting* yang dikemukakan oleh Lee & Plummer (2007), di mana target anggaran periode berjalan lebih dipengaruhi oleh standar kinerja sebelumnya daripada evaluasi kebutuhan riil yang baru. Hal ini terjadi karena birokrasi cenderung mempertahankan "kapasitas belanja" agar anggaran tidak dipotong secara permanen oleh legislatif di tahun-tahun mendatang (Wildavsky & Caiden, 2020). Di sisi lain, bertahannya target tinggi ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya Pemerintah Kota Padang untuk memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa pembangunan tidak akan terhenti, meskipun kapasitas fiskal sedang di bawah tekanan.

3. Bedah Viskositas Fiskal: Mengapa Belanja Begitu "Lengket"?

Pembuktian terkuat adanya *Ratchet Effect* di Kota Padang ditemukan melalui analisis laju pertumbuhan tahunan. Kondisi di mana belanja "tertahan" di atas dan tidak ikut menukik turun mengikuti pendapatan disebut sebagai **Viskositas Fiskal (*Fiscal Viscosity*)**.



Gambar 3. Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Padang Tahun 2020 s.d. 2024

Berdasarkan analisis laju pertumbuhan, terdapat dua fase utama:

1. Fase Respons Krisis (2020-2021): Terjadi lonjakan belanja tidak terduga hingga 1.725,36%. Ini adalah respons adaptif yang sangat baik dalam menangani kedaruratan kesehatan akibat pandemi COVID-19.
2. Fase Pasca-Pandemi (2022-2023): Pada tahun 2022, pertumbuhan pendapatan melambat drastis menjadi 1,23%, namun garis pertumbuhan belanja tetap berada di zona positif.

Sebagaimana dijelaskan oleh **Gerritse (1990)**, viskositas ini terjadi karena anggaran didominasi oleh komponen yang "kental" (sulit diubah mendadak):

1. Belanja Pegawai (Rata-rata tumbuh 6,42%): Kebijakan pengangkatan P3K di Kota Padang menyebabkan beban belanja pegawai bersifat permanen. Biaya ini tidak bisa diturunkan saat PAD turun, sehingga menciptakan *ratchet effect* yang sangat kuat.
2. Belanja Bantuan Sosial (Rata-rata tumbuh 179,01%): Lonjakan ini menunjukkan pemerintah menciptakan standar jaring pengaman sosial baru selama pandemi. Setelah pandemi mereda, ekspektasi masyarakat yang tinggi membuat pemerintah sulit menghentikan program ini secara tiba-tiba tanpa memicu gejolak sosial.

4. Dampak *Crowding Out* pada Belanja Modal

Interpretasi paling krusial dari *Ratchet Effect* ini adalah dampaknya terhadap investasi jangka panjang. Data menunjukkan bahwa Belanja Modal justru mengalami penurunan rata-rata sebesar -6,61%. Ketika Belanja Operasi (rutin) bersifat "ratchet" (terus naik dan terkunci), sementara pendapatan tumbuh melambat, maka satu-satunya cara untuk menyeimbangkan anggaran adalah dengan mengorbankan Belanja Modal. Konsekuensi: Hal ini sangat berisiko dalam jangka panjang. Kota Padang berpotensi mengalami penurunan kualitas infrastruktur karena anggaran terserap habis untuk membiayai rutinitas birokrasi dan bantuan sosial (konsumtif). Inilah sisi gelap dari *Ratchet Effect*: ia cenderung memprioritaskan "kesehatan birokrasi" di atas "pembangunan fisik".

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

5. Interpretasi Akhir: Resiliensi atau Inefisiensi?

Meskipun terdeteksi adanya *Ratchet Effect*, fenomena ini tidak sepenuhnya bermakna negatif. Dahlberg & Mörk (2020) berpendapat bahwa kekakuan belanja pasca-krisis sering kali merupakan konsekuensi dari "Standar Pelayanan Baru". Pasca-COVID, Pemerintah Kota Padang harus mendanai infrastruktur digital birokrasi dan sistem kesehatan yang lebih kuat. Secara keseluruhan, fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai "Resiliensi yang Berisiko":

1. Resiliensi: Pemerintah berhasil menjaga stabilitas pelayanan publik di masa transisi pandemi dengan tidak melakukan pemotongan belanja secara ekstrem demi menjaga roda ekonomi lokal.
2. Risiko: Munculnya ketergantungan pada standar biaya tinggi (viskositas). Jika tidak dibarengi dengan lonjakan PAD di masa depan, hal ini akan menyebabkan defisit fiskal kronis atau terhentinya pembangunan infrastruktur secara permanen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai postur APBD Kota Padang periode 2020-2024, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terbuktinya Fenomena *Ratchet Effect*: Terdapat indikasi kuat terjadinya *Ratchet Effect* pada belanja daerah Kota Padang, di mana target dan realisasi belanja cenderung meningkat secara konsisten dan bersifat kaku untuk turun (*downward rigidity*) meskipun pertumbuhan pendapatan daerah mengalami fluktuasi, terutama pada masa transisi pasca-pandemi COVID-19.
2. Viskositas Fiskal pada Belanja Rutin: Kekakuan anggaran ini didominasi oleh "kekentalan" (*viscosity*) pada sektor Belanja Operasi, khususnya Belanja Pegawai (akibat kebijakan P3K) dan Belanja Bantuan Sosial. Standar belanja yang melonjak selama masa pandemi (1.725,36% pada BTT) telah menciptakan "jangkar" pengeluaran baru yang sulit untuk dievaluasi turun karena adanya ekspektasi publik dan komitmen regulasi.
3. Dampak terhadap Belanja Modal: Terjadinya *Ratchet Effect* pada belanja rutin berdampak pada penurunan alokasi Belanja Modal (rata-rata -6,61%). Hal ini menunjukkan adanya gejala *crowding out*, di mana ruang fiskal untuk investasi infrastruktur jangka panjang terhimpit oleh besarnya biaya operasional birokrasi dan jaring pengaman sosial.
4. Resiliensi Fiskal Kota Padang: Secara objektif, bertahannya level belanja yang tinggi menunjukkan upaya Pemerintah Kota Padang untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal dan kualitas pelayanan publik di tengah krisis. Langkah ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga resiliensi daerah, meskipun harus dibayar dengan fleksibilitas fiskal yang semakin terbatas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Padang:
   a. Penerapan *Zero-Based Budgeting* secara Selektif: Perlu dilakukan evaluasi terhadap program-program yang bersifat rutin (inkremental). Pemerintah sebaiknya tidak hanya menambah anggaran dari tahun sebelumnya, tetapi sesekali mengevaluasi efektivitas program dari nol untuk mengurangi viskositas fiskal.

b. Optimalisasi PAD: Mengingat belanja sulit untuk diturunkan (*ratchet*), maka satu-satunya cara menjaga kesehatan fiskal adalah dengan memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi agar kemandirian fiskal meningkat.
c. Prioritas Belanja Modal: Pemerintah perlu menetapkan *threshold* (ambang batas) minimum untuk belanja modal guna memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan dan tidak terus tergerus oleh belanja operasional.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya:
   a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel penelitian seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau tingkat kemiskinan untuk melihat apakah fenomena *Ratchet Effect* di Kota Padang benar-benar berkorelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Afonso, A., Jalles, J. T., & Venâncio, A. (2019). Taxation and Public Spending Efficiency: An International Comparison. *Comparative Economic Studies*, 61(2), 303-340. https://doi.org/10.1057/s41294-019-00087-0

[2] Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. (2024). *Indeks Transparansi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2019-2024*. https://bpkad.padang.go.id/transparansi-index

[3] Dahlberg, M., & Mörk, E. (2020). Is There a Ratchet Effect in Local Government Spending?. *International Tax and Public Finance*, 27(4), 929-953. https://doi.org/10.1007/s10797-020-09601-y

[4] Gerritse, R. (1990). Producer-Consumer Interaction in the Local Public Sector. *Public Choice*, 66(3), 257-267. https://doi.org/10.1007/BF00127394

[5] Hadjimaskas, C. (2021). Fiscal Policy Asymmetry and the Ratchet Effect in Public Expenditures during Crisis. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(5), 585-605. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2021-0028

[6] Hidayah, N., & Sari, R. P. (2022). Analisis Ratchet Effect dalam Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(1), 12-25. https://doi.org/10.9744/jak.24.1.12-25

[7] Kurniawan, A., & Kusumastuti, R. (2024). Metodologi Penelitian Kuantitatif di Sektor Publik. *Jurnal Administrasi Publik*.

[8] Kurniawan, A., & Kusumastuti, R. (2024). Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-60.

[9] Lee, T. M., & Plummer, E. (2007). Budget Ratcheting and Government Efficiency: Evidence from Local Government Expenditures. *The Accounting Review*, 82(5), 1183-1207. https://doi.org/10.2308/accr.2007.82.5.1183

[10] Mauro, S. G., et al. (2022). The Management of Budgetary Slack and Ratchet Effect in Local Governments during COVID-19. *Public Money & Management*. https://doi.org/10.1080/09540962.2022.2031021

[11] Norton, A., & Elson, D. (2002). *What's Behind the Budget? Politics, Rights and Accountability in the Budget Process*. Overseas Development Institute (ODI).

[12] Pemerintah Kota Padang. (2024). *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023*.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

[13] Puspitasari, D., et al. (2023). Determinants of Budget Ratcheting in Local Government: Evidence from Indonesia. *Journal of Applied Accounting Research*. https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2022-0115
[14] Safitri, E., & Sari, M. (2020). Agency Theory dalam Penganggaran Sektor Publik. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2), 101-115.
[15] Setyaningrum, D., & Syafitri, L. (2012). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Pelaporan Keuangan terhadap Hubungan Keagenan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
[16] Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
[17] Weitzman, M. L. (1980). The Ratchet Principle and Performance Force. *The Bell Journal of Economics*, 11(1), 302-308. https://doi.org/10.2307/3003414
[18] Wildavsky, A., & Caiden, N. (2020). *The New Politics of the Budgetary Process*. Routledge

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)